

## Pemandangan Iklan di Yogyakarta

YOGYAKARTA sebagai kota yang mendapat julukan kota pendidikan dewasa ini mestinya harus diulas kembali. Peralnya ikon yang menandakan pendidikan kini telah tergantikan oleh iklan.

Nuansa komersialisasi ruang publik sangat terasa ketika kita jalan-jalan menyusuri setiap sudut kota karena dimanfaatkan semata-mata hanya untuk iklan. Bahwa iklan-iklan di ruang publik bertebaran di seluruh penjuru kota Yogyakarta.

Lihatlah, sepanjang Jalan Solo sejak masuk kota Yogya dari pertigaan Ring Road wilayah timur kita disuguhi semestinya ditanami pohon pelindung -- yang sarat pohon iklan rokok banyak sekali. Lalu mulai Janti juga iklan rokok super besar melintang di jalan memotong pemandangan perjalanan kita. bahkan terkesan sangat mubadzir, besi-besi besar yang sebetulnya bisa untuk penyeberang, hanya untuk iklan semata.

Kalau toh pemasangan iklan itu diikuti dengan penyangga yang bisa dimanfaatkan bagi penyeberang jalan, rasanya lebih bermanfaat. Lha ini iklan ya untuk iklan, tidak ada manfaat lain. Mungkin pemasangan iklan superbesar itu harus belajar bagaimana beriklan yang baik. Misalnya memanfaatkan ruang di halte, bus surat, papan pengumuman, dan angkutan umum. Kalau begitu, sungguh iklan-iklan itu tidak manusiawi dan tidak menghargai masyarakat yang sangat membutuhkan kebebasan pemandangan yang luas.

Kiranya masyarakat tidak keberatan jika alasan yang sering dikemukakan pemerintah kota/kabupaten adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun saya tak habis pikir mengapa pemerintah tega-teganya memotong hak warga masyarakat yang membutuhkan pemandangan luas.

Bayangkan, kanan kiri-jalan di sepanjang kota Yogyakarta sudah dipenuhi oleh parkir kendaraan yang dikelola para tukang parkir, sementara trotoar dipenuhi pedagang kaki lima yang mengesankan Yogyakarta kota pedagang kaki lima, tidakkah pemerintah punya pemikiran bagaimana mengaturnya agar masyarakat tetap bisa mendapatkan hak atas pemandangan luas ?

Bahwa apa yang dilakukan pemerintah dengan membebaskan pemasangan iklan sebesar-besarnya telah melanggar kode etik pelayanan terhadap masyarakat. Kalau begini terus pemerintah tak berorientasi ke masyarakat yang seharusnya mendapat prioritas untuk diperhatikan. Pemerintah hanya berpikir komersil atas nama peningkatan PAD.

Saatnya pemerintah berbenah dan mempublikasikan setiap kebijakan yang

menyangkut kepentingan umum.

Karena pemasangan iklan superbesar memotong hak masyarakat, semestinya ketika sebelum kebijakan ini diterapkan disosialisasikan dulu ke masyarakat. Apakah masyarakat setuju dengan pemasangan iklan besar-besaran? Namun ketika sudah terlanjur, alangkah baiknya pemerintah minta maaf sembari menjelaskan mengapa iklan besar diperbolehkan dipasang.

Saya kira jika pemerintah benar-benar berdasarkan pemikiran jernih tentang persoalan ini masyarakat tidak akan menolaknya, justru mendukungnya.

**Kholilul Rohman Ahmad**  
Mahasiswa Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta